KEPATUHAN PERUSAHAAN GO-PUBLIK INDONESIA PADA *CODE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Clarisa Thiasel¹, Farhan Kesar Ashakur², Zaitul³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email: clarisathsl@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan terbuka di Indonesia mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 dan POJK No.33/POJK.04/2014. Penerapan GCG dianggap krusial dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kinerja perusahaan, sekaligus memperkuat kepercayaan dari investor maupun pemangku kepentingan lainnya. Kajian ini secara khusus menyoroti dua elemen utama GCG, yaitu keberadaan Dewan Komisaris Independen dan efektivitas kerja Komite Audit Independen, serta bagaimana kedua aspek tersebut memengaruhi Return on Assets (ROA) dan harga saham perusahaan. Pendekatan penelitian bersifat normatif dengan metode studi pustaka, yang memanfaatkan data sekunder berupa laporan tahunan dari 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Temuan menunjukkan bahwa seluruh sampel telah memenuhi ketentuan minimum proporsi 30% Komisaris Independen sesuai regulasi. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam hal latar belakang serta kapabilitas anggota Komite Audit, yang berdampak pada kualitas pengawasan serta keandalan laporan keuangan. Perusahaan yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) dari kelompok "Big Four" cenderung menunjukkan stabilitas yang lebih tinggi dalam ROA dan harga saham, mencerminkan penilaian pasar yang lebih positif. Studi ini juga menemukan adanya hubungan positif antara kepatuhan terhadap prinsip GCG dengan efisiensi operasional dan kestabilan harga saham, yang selaras dengan teori agensi dan signaling. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas pengawasan dan kompetensi audit untuk menekan potensi kecurangan serta memperkuat daya saing perusahaan di pasar modal.

Kata kunci: *Good Corporate Governance, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit*

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the extent to which public companies in Indonesia comply with the principles of Good Corporate Governance (GCG) in accordance with the provisions of POJK No.55/POJK.04/2015 and POJK No.33/POJK.04/2014. The implementation of GCG is considered crucial in encouraging transparency, accountability, and improving company performance, while strengthening the trust of investors and other stakeholders. This study specifically highlights two key elements of GCG, namely the existence of an Independent Board of Commissioners and the effectiveness of the work of the Independent Audit Committee, as well as how these two aspects affect the company's Return on Assets (ROA) and share price. The research approach is normative with a literature study method, which utilizes secondary data in the form of annual reports from 30 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2024. The findings show that all samples have met the minimum provisions of the 30% proportion of Independent Commissioners according to regulations. However, there are differences in terms of the background and capabilities of the members of the Audit Committee, which have an impact on the quality of supervision and the reliability of financial statements. Companies that use the services of Public Accounting Firms (KAPs) from the "Big Four" group tend to show higher stability in ROA and stock prices, reflecting a more positive market valuation. The study also found a positive relationship between compliance with GCG principles and operational efficiency and stock price stability, which is in line with agency theory

and signaling. Therefore, this study recommends improving the quality of supervision and audit competence to reduce the potential for fraud and strengthen the competitiveness of companies in the capital market.

Keywords: *Good Corporate Governance, Independent Board of Commissioners, Audit Committee*

PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) telah menjadi perhatian penting dalam manajemen perusahaan modern, khususnya di tengah dinamika globalisasi dan meningkatnya kompleksitas dunia usaha. Di Indonesia, pelaksanaan GCG diatur melalui *Indonesia's Code of Good Corporate Governance* yang disusun oleh (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006) serta diperkuat oleh sejumlah regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK No.55/POJK.04/2015 dan POJK No.33/POJK.04/2014 yang mengatur tata kelola bagi emiten dan perusahaan publik. GCG tidak hanya dimaksudkan untuk mendorong kinerja perusahaan secara optimal, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, seperti investor, tenaga kerja, dan masyarakat luas. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan perusahaan terbuka terhadap prinsip-prinsip GCG masih menunjukkan ketimpangan, di mana beberapa kasus mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal serta pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap performa keuangan dan nilai saham perusahaan (POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, 2015)

Keberadaan Dewan Komisaris Independen menjadi salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Hamdi et al., 2021; Ilona et al., 2019; Desi Ilona et al., 2023; Zaitul et al., 2019, 2021, 2022, 2023; Zaitul & Ilona, 2018). Dewan ini memiliki fungsi pengawasan yang bersifat independen, khususnya dalam menilai kinerja manajemen dan keputusan strategis perusahaan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014, setiap emiten atau perusahaan publik diwajibkan memiliki setidaknya 30% dari total anggota Dewan Komisaris yang berasal dari kalangan independen. Ketentuan ini bertujuan utama untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan strategis di dalam perusahaan dilakukan secara objektif, profesional, dan terbebas dari benturan kepentingan.

Keberadaan Dewan Komisaris Independen sangat penting dalam konteks Agency Theory, sebagaimana dijelaskan oleh Jensen dan Meckling, yang menekankan adanya potensi konflik kepentingan (agency conflict) antara manajemen (agent) dan pemegang saham (principal).

Komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mampu menyeimbangkan kekuasaan manajemen, memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak semata-mata menguntungkan pihak internal, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya (Meckling, 2014). Tetapi, implementasi prinsip ini di Indonesia masih menghadapi tantangan. Meskipun secara formal perusahaan memenuhi persyaratan kuantitatif proporsi komisaris independen, dalam praktiknya banyak Dewan Komisaris yang didominasi oleh individu yang memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali atau manajemen.

Hal ini terutama terjadi pada perusahaan keluarga atau emiten yang dikendalikan oleh konglomerasi bisnis, di mana peran komisaris independen sering kali bersifat simbolik (nominal) tanpa memiliki kekuatan substantif dalam pengambilan keputusan strategis (Claessens & Yurtoglu, 2013). Akibatnya, efektivitas pengawasan dan peran Dewan Komisaris Independen dalam menjaga akuntabilitas serta melindungi hak pemegang saham minoritas menjadi terbatas. Dengan demikian, meskipun secara regulatif keberadaan komisaris independen telah diatur dengan jelas, tantangan utama terletak pada kualitas dan independensi aktual dari individu yang mengisi posisi tersebut. Diperlukan penguatan pengawasan eksternal dan budaya tata kelola yang sehat agar peran Dewan Komisaris Independen tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja perusahaan.

Keberadaan komisaris independen menjamin perlindungan kepentingan seluruh pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, karena posisi mereka yang tidak memihak dalam pengambilan keputusan manajerial (Filia, 2017). Kedudukan sebagai komisaris bukanlah posisi yang bebas risiko, melainkan memikul tanggung jawab yang signifikan (DeFond & Zhang, 2014). Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menetapkan persyaratan yang ketat bagi calon komisaris, termasuk kewajiban fidusia (*fiduciary duties*) terkait kepemilikan saham mereka dalam perusahaan. Kewajiban pelaporan kepemilikan saham ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan.

Selain keberadaan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Independen juga memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip GCG. Berdasarkan POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit, struktur Komite Audit diwajibkan untuk dipimpin oleh seorang Komisaris Independen, serta mencakup minimal satu

anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Komite ini bertanggung jawab dalam menjamin integritas laporan keuangan serta mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang menempatkan individu yang kurang kompeten di dalam Komite Audit, sehingga memperbesar kemungkinan kegagalan dalam mengidentifikasi tindakan kecurangan maupun kesalahan dalam pelaporan (Effendi, 2009) Perusahaan yang memiliki Komite Audit yang profesional umumnya menjalin kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) bereputasi global seperti anggota "Big Four", yang dapat memperkuat kredibilitas laporan keuangan dan meningkatkan tingkat kepercayaan investor. Studi yang dilakukan oleh Lennox dan Pittman (Lennox & Pittman, 2010) juga menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa KAP dari kelompok "Big Four" cenderung memiliki kualitas pelaporan yang lebih tinggi serta tingkat risiko kecurangan yang lebih rendah.

Dari perspektif kinerja keuangan, ROA sering digunakan sebagai proksi keberhasilan penerapan GCG, karena mencerminkan efisiensi penggunaan aset perusahaan. Penelitian sebelumnya (Maghfirah & Giyartiningrum, 2024) menemukan korelasi positif antara kepatuhan GCG dan ROA, terutama pada perusahaan dengan struktur Dewan Komisaris dan Komite Audit yang independen. Selain itu, kualitas audit dari KAP ternama juga berpengaruh terhadap akurasi laporan keuangan, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi investor. Dampak kepatuhan GCG terhadap harga saham dapat dilihat melalui teori signaling (Spence, 1973), di mana struktur tata kelola yang baik menjadi sinyal positif bagi pasar. Perusahaan yang mematuhi prinsip GCG cenderung memiliki *cost of capital* lebih rendah dan harga saham lebih stabil, terutama dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Sebaliknya, pelanggaran GCG seperti kasus manipulasi laporan keuangan di PT Asabri Persero (2021) berdampak pada penurunan harga saham dan sanksi regulasi.

Mengacu pada uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Kajian ini menjadi penting sebagai upaya strategis untuk memperkuat daya saing perusahaan melalui mitigasi berbagai risiko yang berpotensi merugikan, sekaligus mendorong perbaikan dalam kinerja keuangan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Mengidentifikasi Kepatuhan Perusahaan Go-Publik di BEI terhadap Norma GCG dalam POJK No.33/POJK.04/2014 dan POJK No.55/POJK.04/2015, dan (ii) Menganalisis Korelasi Elemen GCG terhadap Kinerja Perusahaan.

LITERATURE REVIEW

Good Corporate Governance (GCG) merupakan kerangka penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kinerja perusahaan, terutama dalam konteks pasar modal di Indonesia. *Indonesia's Code of Good Corporate Governance* yang disusun oleh (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006) menyoroti lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diperkuat melalui regulasi OJK, salah satunya POJK No.33/POJK.04/2014, yang mewajibkan perusahaan publik dan emiten untuk memiliki susunan dewan komisaris independen setidaknya sebesar 30% serta membentuk komite audit yang memiliki kompetensi memadai. Studi yang dilakukan oleh Claessens dan Yurtoglu (2013) dalam laporan berjudul "*Corporate Governance in Emerging Markets: A Survey*" mengungkapkan bahwa perusahaan dengan struktur GCG yang kokoh cenderung menunjukkan kinerja keuangan yang lebih unggul dan tingkat risiko korupsi yang lebih rendah.

Dewan Komisaris Independen memiliki peran penting sebagai pengawas yang benar-benar bebas dari pengaruh dan kepentingan manajemen perusahaan. Fungsi utama mereka adalah menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, yang sering disebut dengan istilah *agency problem*. Dengan kata lain, keberadaan komisaris independen bertujuan memastikan bahwa keputusan strategis dan operasional perusahaan dilakukan secara transparan dan akuntabel demi kepentingan para pemilik saham dan stakeholder lainnya. Untuk memperkuat peran tersebut, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No.33/POJK.04/2014 menetapkan bahwa sekurang-kurangnya 30% anggota dalam dewan komisaris harus berasal dari komisaris independen. Ketentuan ini dimaksudkan agar keberadaan komisaris independen tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi kekuatan nyata dalam proses pengawasan.

Namun demikian, temuan dari studi Bhagat dan Black (Bhagat, S., & Black, 2005) dalam publikasi mereka yang berjudul *The Non-Correlation Between Board Independence and Firm Performance* mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah komisaris independen dalam dewan tidak selalu berdampak positif secara langsung terhadap kinerja perusahaan. Artinya, dominasi komisaris independen saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas dan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa faktor lain seperti kualitas pengawasan, dinamika internal, dan budaya perusahaan juga sangat menentukan keberhasilan kinerja. Di sisi lain, studi tersebut juga

menegaskan bahwa apabila unsur independen dalam dewan komisaris tidak ada sama sekali, maka fungsi pengawasan menjadi sangat lemah dan rentan terhadap dominasi manajemen. Dengan demikian, meskipun komisaris independen bukanlah satu-satunya faktor kunci peningkatan kinerja, keberadaannya tetap esensial untuk menjaga mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan dalam perusahaan.

Penelitian oleh Sucitra, dkk (2020) memperkuat pentingnya independensi, dengan temuan bahwa perusahaan yang memenuhi ambang batas $\geq 30\%$ dewan independen cenderung memiliki tingkat manipulasi laporan keuangan yang lebih rendah dan kestabilan harga saham yang lebih baik. Selain dewan komisaris, keberadaan Komite Audit dan kualitas audit juga menjadi elemen penting dalam menjamin integritas informasi keuangan perusahaan. Komite Audit memiliki tugas utama untuk mengawasi dan memastikan akurasi serta transparansi laporan keuangan. Hal ini diatur dalam POJK No.55/POJK.04/2015, yang memuat ketentuan mengenai pembentukan, pedoman pelaksanaan tugas Komite Audit, dan relevansi pengaturannya dalam anggaran dasar perusahaan.

Penelitian DeFond & Zhang (DeFond & Zhang, 2014). dalam "*A Review of Archival Auditing Research*" menunjukkan bahwa komite audit yang profesional mengurangi risiko financial misstatement. Di Indonesia, perusahaan yang menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) "Big Four" cenderung mendapat opini audit lebih baik dan reaksi pasar lebih positif....

Adapun dampak GCG pada ROA dan Harga Saham, sebagai berikut:

a. Return on Assets (ROA)

ROA mencerminkan efisiensi penggunaan aset. Studi Klapper & Love (Klapper & Love, 2004), menemukan bahwa perusahaan dengan GCG kuat memiliki ROA 1.5% lebih tinggi daripada perusahaan dengan tata kelola lemah. Mekanisme utamanya adalah:

- 1) Pengurangan *agency cost* (Jensen & Meckling, 1976).
- 2) Alokasi sumber daya lebih efisien.

b. Harga Saham

GCG berperan sebagai signal positif bagi investor (Spence, 1973) Contoh:

- 1) Perusahaan dengan laporan GCG memiliki abnormal return lebih tinggi (Andrianingsih & Prasetyo, 2023).
- 2) Skandal GCG (PT Trada Alam Minera, 2021) menyebabkan penurunan harga saham 40% dalam seminggu (BEI, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif, yang berarti fokus utamanya adalah pada kajian terhadap peraturan hukum atau ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, data primer yang digunakan berupa norma-norma GCG sebagaimana tercantum dalam POJK No.33/POJK.04/2014 dan POJK No.55/POJK.04/2015. Adapun data sekunder dikumpulkan dari laporan tahunan tahun 2024 milik 30 perusahaan emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta berbagai referensi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (Library Research), yakni dengan mengumpulkan informasi dari beragam dokumen dan sumber tertulis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, melalui interpretasi dan penyusunan narasi yang runtut, jelas, dan mudah dipahami. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk paparan umum yang tetap didasarkan pada data dan fakta spesifik, yang akan menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepatuhan Perusahaan Go-Publik di BEI terhadap Norma GCG dalam POJK No.33/POJK.04/2014 dan POJK No.55/POJK.04/2015

POJK No.33/PJOK.04/2014 menegaskan bahwa, komposisi Dewan Komisaris Independen seminimalnya adalah 30% dari total anggota Dewan Komisaris. Hal ini diperuntukan sebagai upaya untuk menghindari resiko adanya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. KNKG menghadirkan *Indonesia's Code of GCG (2006)* sebagai acuan perusahaan dalam mengimplementasikan CGC. Salah satu indikator yang mendorong GCG adalah komposisi Komite Audit Independen seminimalnya 30% dari total anggota dan penggunaan Kantor Akuntan Publik agar terjaminnya kualitas audit dalam meminimalisir resiko *fraud* pada laporan keuangan perusahaan.

Indikator Komposisi DKI diperoleh dengan membagi jumlah Dewan Komisaris Independen dengan total jumlah anggota Dewan Komisaris. Indikator kepatuhan diberi nilai 1 jika Komposisi DKI bernilai lebih dari 0,3 dan diberi nilai 0 jika dibawah 0,3. Sementara indikator Komposisi KAI diambil dari jumlah Komite Audit Independen dibagi jumlah seluruh anggota Komite Audit. Lebih lanjut, indikator KAP dilihat dari laporan tahunan perusahaan dalam memanfaatkan Kantor Akuntan Publik,

nilai 1 diberikan kepada perusahaan yang menggunakan KAP (terafiliasi dalam *Big Four*) dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak menggunakan KAP yang terafiliasi dalam *Big Four Company*. Indikator ROA dan Harga Saham diambil dari laporan tahunan emiten yang tersedia di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2024.

Tabel 1. Deskripsi Variabel 30 emiten pada BEI Tahun 2024

Kode Perusahaan	Komposisi DKI (2024)	Kepatuhan	Jumlah DK (2024)	Komposisi KAI (2024)	Tipe KAP (2024)	ROA (2024) (%)	Harga saham (2024)
AADI	0,5	1	2	0,33	1	22	8745
ADMR	0,33	1	6	1	1	21	1200
ALDO	0,5	1	2	0,33	0	-0,4	645
ALII	0,33	1	3	1	1	11,62	372
ANTM	0,6	1	5	1	0	8,65	1525
ASII	0,36	1	11	0,25	1	9	4900
BAIK	0,5	1	2	0,33	0	4,3	59
BATR	0,5	1	2	0,33	0	4,73	77
CMPP	0,5	1	4	1	1	26,7	86
DGIK	0,33	1	3	0,33	0	4,06	80
DOSS	0,5	1	2	1	0	8,34	185
FPNI	0,5	1	2	1	1	5,12	188
HYGN	0,33	1	3	0,33	0	8,69	148
INDF	0,375	1	8	1	0	6,7	7700
JPFA	0,4	1	5	1	1	9,3	1940
KLBF	0,33	1	6	1	1	11	1360
LIFE	0,5	1	6	1	1	2,38	7250
LIVE	0,33	1	3	0,33	0	5,1	190
LPPF	0,5	1	4	1	1	16,1	1760
MDIY	0,5	1	4	0,33	0	17	1780

MHKI	0,5	1	2	1	0	6,86	95
MOLI	0,33	1	6	0,33	0	0,9	214
OMED	0,33	1	3	1	0	11,47	180
PTMR	0,33	1	3	0,33	0	4,32	129
SILO	0,6	1	5	1	0	6,69	3090
SOLA	0,33	1	3	0,33	0	3,63	50
TLKM	0,33	1	9	1	1	10,3	2710
UNTR	0,375	1	8	0,33	1	12,1	26775
VERN	0,5	1	2	0,33	0	1,28	80
ZONE	0,33	1	3	1	0	0,94	825

(Sumber: Olahan data peneliti, 2025)

Tabel di atas menyajikan data mengenai proporsi Komisaris Independen dari 30 perusahaan (emiten) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2024. Dari data tersebut, terlihat bahwa rata-rata proporsi Komisaris Independen mencapai 42,2%, yang berarti hampir setengah dari seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan komisaris yang bersifat independen. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut secara umum sudah memenuhi dan bahkan melampaui ketentuan yang diatur dalam POJK No.33/POJK.04/2014, yang mewajibkan minimal 30% anggota Dewan Komisaris harus bersifat independen untuk menjaga objektivitas dan mengurangi potensi konflik kepentingan.

Selain itu, jumlah total anggota Dewan Komisaris per perusahaan juga bervariasi dengan rata-rata sekitar 4 orang, dengan jumlah terkecil sebanyak 2 anggota dan yang terbesar mencapai 11 anggota. Variasi ini menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing perusahaan. Dengan proporsi independen yang cukup besar, Dewan Komisaris diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, terutama dalam mengawasi manajemen dan menjaga kepentingan pemegang saham minoritas. Kepatuhan terhadap persyaratan proporsi Komisaris Independen ini penting karena Komisaris Independen berperan sebagai pengawas yang bebas dari pengaruh manajemen dan pemegang saham mayoritas, sehingga dapat memberikan penilaian dan keputusan yang objektif demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

Tabel 2. Deskripsi Tabel

	DKI	JDK	KAI	KAP	ROA	HS
Rata-rata	0,422	4,233	0,685	0,400	8,663	2477,933
Min	0,330	2,000	0,250	0,000	-0,400	50,000
Mak	0,600	11,000	1,000	1,000	26,700	26775,000
SD	0,092	2,373	0,343	0,498	6,564	5183,093

(Sumber: Olahan data peneliti, 2025)

Tabel tersebut mengungkapkan bahwa proporsi rata-rata anggota Komite Audit Independen di perusahaan cukup tinggi, yaitu mencapai 68,5%. Hal tersebut menegaskan bahwa sebagian besar perusahaan telah memenuhi syarat keberadaan komite audit yang bebas dari pengaruh manajemen atau pemegang saham pengendali, yang sangat penting untuk menjaga objektivitas dalam pengawasan laporan keuangan. Namun, meskipun komite audit independen relatif kuat, hanya sekitar 40% perusahaan yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) dari kelompok "Big Four" yang dikenal memiliki reputasi dan standar audit tertinggi di dunia. Sisanya memilih KAP non-Big Four, yang mungkin memiliki kualitas dan kredibilitas audit yang lebih bervariasi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mayoritas emiten belum mampu menjamin kualitas audit secara optimal, sehingga risiko terjadinya fraud atau manipulasi laporan keuangan tetap ada.

Dari perspektif kinerja keuangan, rata-rata Return on Assets (ROA) sebesar 8,663% mengindikasikan bahwa perusahaan cukup efisien dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. ROA yang tinggi umumnya mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya secara optimal. Namun, ketika melihat harga saham perusahaan, ditemukan rentang yang sangat lebar, mulai dari Rp50 sampai lebih dari Rp26 juta per saham. Perbedaan harga saham yang sangat signifikan ini mengindikasikan adanya fluktuasi pasar yang cukup tinggi, yang juga tercermin dari nilai standar deviasi yang besar. Fluktuasi harga saham yang tinggi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sentimen pasar, kondisi ekonomi makro, kinerja perusahaan, serta persepsi investor terhadap kualitas tata kelola perusahaan dan risiko keuangan. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa meskipun perusahaan memiliki struktur pengawasan internal yang memadai melalui komite audit independen, masih terdapat tantangan dalam memastikan kualitas audit eksternal yang optimal. Variasi kinerja keuangan dan

volatilitas harga saham juga menandakan bahwa kepatuhan terhadap GCG harus terus diperkuat untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing perusahaan di pasar modal.

Dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG), meskipun sebagian besar perusahaan sudah memiliki struktur pengawasan internal yang baik, seperti keberadaan Komite Audit Independen yang rata-rata komposisinya mencapai 68,5%, efektivitas pengawasan tersebut masih bergantung pada kualitas audit eksternal. Sayangnya, hanya 40% dari perusahaan dalam sampel yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terafiliasi dengan *Big Four*.

Penggunaan KAP dari *Big Four* sangat penting dalam konteks ini, karena mereka umumnya memiliki standar audit yang lebih ketat dan independensi yang lebih kuat, yang dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah potensi fraud atau manipulasi dalam laporan keuangan. Ketiadaan auditor berkualitas tinggi dalam sebagian besar perusahaan dapat memunculkan celah pengawasan, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan investor dan memperbesar risiko pasar.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan dalam POJK No.33/POJK.04/2014 dan POJK No.55/POJK.04/2015 tidak hanya penting sebagai bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai strategi peningkatan kepercayaan pasar. Kepatuhan ini harus dilihat bukan semata-mata sebagai formalitas, melainkan sebagai fondasi tata kelola yang baik untuk memperkuat daya saing dan ketahanan perusahaan di tengah fluktuasi pasar yang dinamis. Ke depan, perusahaan go publik harus mempertimbangkan peningkatan kualitas tata kelola melalui peningkatan proporsi pengawasan independen dan penggunaan KAP yang kredibel agar nilai perusahaan dapat tercermin secara konsisten dan positif dalam kinerja keuangan maupun harga saham.

B. Korelasi Elemen GCG terhadap Kinerja Perusahaan

Berdasarkan ketentuan dalam POJK No.33/POJK.04/2014, persentase minimal 30% anggota dewan komisaris independen bertujuan untuk beberapa hal, yaitu: (1) Meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, karena anggota dewan independen tidak memiliki keterkaitan dengan pemegang saham mayoritas maupun pihak manajemen., sehingga keputusan strategis yang diambil lebih bersifat objektif (Effendi, 2009) (2) Meningkatkan transparansi dengan memastikan dewan independen dapat mengawasi pengungkapan informasi secara akurat dan tepat waktu, termasuk laporan keuangan serta risiko bisnis; dan (3) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak

pemegang saham minoritas dengan mencegah dominasi dari pemegang saham pengendali serta memastikan semua pemegang saham diperlakukan secara adil (Claessens & Yurtoglu, 2013).

Komite Audit merupakan salah satu organ penting dalam susunan tata kelola perusahaan yang kedudukannya dibawah tanggung jawab Dewan Komisaris. Keberadaan komite ini bertujuan untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan, khususnya dalam aspek keuangan dan pengendalian internal. Peran strategis Komite Audit semakin signifikan dalam memastikan bahwa perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Pertama, salah satu fungsi utama Komite Audit adalah melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit eksternal terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam praktik yang baik, komite audit yang bersifat independen akan cenderung menunjuk KAP dari kelompok Big Four (seperti Deloitte, PwC, Ernst & Young, dan KPMG) yang dikenal memiliki reputasi dan integritas tinggi dalam proses audit. Pemilihan auditor yang kompeten dan independen sangat krusial untuk menjamin bahwa laporan keuangan perusahaan disusun dan diaudit secara objektif dan profesional (Putri & Pradana, 2022). Kedua, Komite Audit memiliki fungsi penting dalam mencegah terjadinya kecurangan (fraud) di dalam perusahaan. Hal ini dilakukan melalui pemantauan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal. Komite Audit juga bertugas untuk menelaah secara cermat laporan keuangan guna mendeteksi adanya indikasi manipulasi atau penyimpangan yang berpotensi merugikan perusahaan dan pemegang saham (Budi gautama Siregar, 2021). Ketiga, Komite Audit berperan dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Laporan hasil audit eksternal yang dihasilkan melalui proses yang independen dapat menjadi dasar informasi yang kredibel bagi pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan publik. Tingkat akuntabilitas yang tinggi ini sangat penting dalam membangun kepercayaan pasar terhadap integritas dan kinerja keuangan perusahaan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor (Gompers et al., 2003).

Selain itu, perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terutama yang didukung oleh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit yang kompeten, dan Kantor Akuntan Publik bereputasi cenderung menunjukkan performa keuangan yang lebih baik. Hal ini tercermin pada Return on Assets (ROA) yang lebih tinggi, berkat pengelolaan risiko yang lebih

efektif, serta harga saham yang lebih stabil karena meningkatnya keyakinan investor terhadap transparansi dan integritas perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG yang kuat tidak hanya memperkuat pengawasan internal tetapi juga memberikan dampak positif langsung pada nilai dan keberlanjutan perusahaan di pasar modal.

Tabel 3. Hubungan antara kepatuhan pada CG dan Kinerja Perusahaan

		DKI	JDK	KAI	KAP
ROA	Pearson Correlation	0,078	0,155	0,252	0,555**
	Sig. (2-tailed)	0,681	0,414	0,180	0,001
	N	30	30	30	30
HS	Pearson Correlation	-0,005	0,485**	-0,123	0,368*
	Sig. (2-tailed)	0,977	0,007	0,517	0,046
	N	30	30	30	30

Cat. * dan ** menunjukan signifikan pada $\alpha=10\%$ dan 5%

(Sumber: Olahan data peneliti, 2025)

Tabel tersebut menyajikan hasil uji korelasi Pearson antara elemen-elemen Good Corporate Governance (GCG) dan dua indikator utama kinerja perusahaan, yaitu Return on Assets (ROA) dan Harga Saham (HS). Hasil korelasi terhadap ROA menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen (DKI) memiliki korelasi sebesar 0,078, Jumlah Dewan Komisaris (JDK) sebesar 0,155, dan Komite Audit Independen (KAI) sebesar 0,252 seluruhnya tidak menunjukkan signifikansi statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara teoritis keberadaan dewan independen dan komite audit penting untuk pengawasan internal, namun dalam praktiknya belum memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Kemungkinan penyebabnya antara lain peran dewan yang belum optimal, rendahnya intensitas pengawasan, atau kurangnya keahlian teknis dalam memahami laporan keuangan secara mendalam.

Sementara itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) menunjukkan korelasi sebesar 0,555 terhadap ROA, dan nilai tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Kredibilitas auditor eksternal dari Big Four meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko kesalahan atau manipulasi dalam pelaporan keuangan.

Hal ini mendukung pandangan bahwa mekanisme pengawasan eksternal yang kuat dapat berperan sebagai katalis peningkatan kinerja internal perusahaan.

Korelasi terhadap Harga Saham (HS) menunjukkan hasil yang menarik. DKI mencatat nilai korelasi -0,005 yang tidak signifikan, menandakan bahwa kehadiran komisaris independen belum cukup mempengaruhi persepsi pasar. Sebaliknya, JDK menunjukkan korelasi sebesar 0,485 yang signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$. Ini mencerminkan bahwa struktur dewan komisaris yang lebih besar diasosiasikan oleh pasar sebagai bentuk tata kelola yang lebih kuat, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap arah dan strategi perusahaan. KAI mencatat korelasi negatif sebesar -0,123 yang tidak signifikan, mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit belum dipandang memberikan nilai tambah oleh pasar, kemungkinan karena fungsi dan peran komite audit yang belum sepenuhnya dipahami oleh investor publik atau kurang terpublikasi dalam laporan tahunan perusahaan.

Adapun KAP kembali menunjukkan pengaruh yang cukup kuat terhadap HS, dengan nilai korelasi sebesar 0,368 dan signifikan pada tingkat 10% ($\alpha = 0,10$). Ini menegaskan bahwa reputasi auditor eksternal tidak hanya berdampak pada kinerja internal (ROA), tetapi juga memiliki pengaruh terhadap persepsi pasar, karena investor menilai kualitas audit sebagai indikator keandalan informasi dan stabilitas perusahaan. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa di antara seluruh komponen GCG yang dianalisis, keberadaan Kantor Akuntan Publik bereputasi tinggi (Big Four) dan jumlah anggota dewan komisaris merupakan dua faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, baik dari aspek keuangan maupun pasar. Artinya, pengawasan eksternal dan keragaman kepemimpinan strategis dalam struktur dewan memiliki korelasi yang lebih nyata terhadap penciptaan nilai perusahaan. Temuan ini sejalan dengan teori agensi, di mana pengawasan efektif (baik dari luar maupun dalam) akan menurunkan asimetri informasi dan meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, meskipun tidak semua unsur GCG memberikan dampak langsung terhadap kinerja perusahaan, penguatan kualitas pelaksanaan GCG, terutama dalam hal independensi, keahlian, dan transparansi, tetap menjadi fondasi penting dalam membangun perusahaan yang sehat, berdaya saing, dan dipercaya pasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum perusahaan telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap regulasi tata kelola perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Hal ini bisa diketahui dari keberadaan Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Independen di seluruh perusahaan yang diteliti. Secara kuantitatif, proporsi Dewan Komisaris Independen berada pada angka rata-rata 44%, sedangkan Komite Audit Independen memiliki proporsi rata-rata 68,5% dari keseluruhan anggota komite. Kedua angka tersebut mengindikasikan bahwa struktur pengawasan internal di perusahaan telah memenuhi syarat minimum yang ditetapkan regulator. Namun, efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan, tetapi juga oleh kualitas serta independensi pengawas internal.

Di sisi lain, hanya 40% dari emiten yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi dengan Big Four. Rendahnya angka ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi risiko fraud atau manipulasi laporan keuangan yang lebih tinggi, mengingat KAP yang bereputasi global umumnya memiliki standar audit yang lebih ketat dan independen. Penggunaan KAP non-Big Four tidak selalu buruk, namun bisa mencerminkan keterbatasan dalam kapasitas audit, terutama bagi perusahaan dengan kompleksitas transaksi yang tinggi. Lebih lanjut, temuan ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) memiliki korelasi yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya yang diukur melalui Return on Assets (ROA) serta kestabilan harga saham. Secara spesifik, jumlah anggota Dewan Komisaris dan penggunaan KAP bereputasi tinggi (Big Four) merupakan dua variabel GCG yang paling konsisten berhubungan positif dan signifikan terhadap performa keuangan dan persepsi pasar terhadap perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan formal terhadap peraturan GCG perlu diiringi oleh penguatan kualitas tata kelola secara substantif, terutama melalui peningkatan profesionalisme pengawas internal dan pemilihan auditor eksternal yang kredibel. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat integritas laporan keuangan, serta mendorong pencapaian kinerja jangka panjang perusahaan yang berkelanjutan. Beberapa saran untuk pihak atau lembaga yang berkepentingan adalah (1) Otoritas Regulasi (OJK & BEI): (i) Memperketat pengawasan implementasi comply-or-explain atas kepatuhan komposisi dewan

independen, khususnya untuk emiten dengan aset besar atau sektor high-risk, dan (ii) Mengembangkan pedoman spesifik pemilihan KAP (misal: fit-and-proper test) untuk meningkatkan kualitas audit. Untuk (2) Emiten adalah (i) Meningkatkan proporsi komisaris independen >30% guna memperkuat objektivitas pengambilan keputusan strategis, dan (ii) Melakukan independent assessment berkala terhadap kinerja komite audit, termasuk evaluasi keterlibatan KAP Big Four. Selanjutnya untuk (3) Investor yaitu (i) Mempertimbangkan tingkat kepatuhan GCG (khususnya independensi dewan dan komite audit) sebagai indikator tambahan dalam analisis fundamental, dan (ii) Mendorong emiten untuk meningkatkan transparansi melalui shareholder engagement.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianingsih, A., & Prasetyo, A. B. (2023). Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit dan Manajemen Laba Terhadap Audit Report Lag. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(1).
- Bhagat, S., & Black, B. S. (2005). The Non-Correlation Between Board Independence and Long-Term Firm Performance. *SSRN Electronic Journal*.
- Budi gautama Siregar. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1). <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3799>
- Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2013). Corporate governance in emerging markets: A survey. In *Emerging Markets Review* (Vol. 15). <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2012.03.002>
- DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. *Journal of Accounting and Economics*, 58(2–3), 275–326. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.002>
- Effendi, Muh. A. (2009). The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi Edisi ke-2. In *salemba empat*.
- Filia, P. (2017). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. *Manajemen Teori Dan Terapan*, 1999(2), 189–215.
- Gompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (2003). Corporate governance and equity prices. In *Quarterly Journal of Economics* (Vol. 118, Issue 1). <https://doi.org/10.1162/00335530360535162>
- Ilona, D., Zaitul, & Ethika. (2019). Supervisory Board and company borrowing: The case of developing economics. *Journal of Reviews on Global Economics*, 8. <https://doi.org/10.6000/1929-7092.2019.08.63>

- Ilona, Desi, Abidin, S., Ahmad-Zaluki, N. A., & Zaitul, Z. (2023). Does the New Revised Code of Corporate Governance Impede Board Diversity? Evidence from Indonesia. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 495–511.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4). [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Klapper, L. F., & Love, I. (2004). Corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets. *Journal of Corporate Finance*, 10(5), 703–728. [https://doi.org/10.1016/S0929-1199\(03\)00046-4](https://doi.org/10.1016/S0929-1199(03)00046-4)
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Lennox, C., & Pittman, J. (2010). Auditing the auditors: Evidence on the recent reforms to the external monitoring of audit firms. *Journal of Accounting and Economics*, 49(1–2), 84–103. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.04.002>
- Maghfirah, N., & Giyartiningrum, E. (2024). Systematic literatur review: good corporate governace dan kinerja keuangan. In *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* (Vol. 5, Issue 2). <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/index>
- Meckling, M. C. J. and W. H. (2014). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Ojk.Go.Id 1 (2015). <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-objk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf>
- PT Trada Alam Minera. (2021a). *PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Keberatan Atas Penyitaan 51% Sahamnya di Hanochem Shipping*.
- PT Trada Alam Minera. (2021b). *PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Keberatan Atas Penyitaan 51% Sahamnya di Hanochem Shipping*.
- Putri, E. P., & Pradana, B. I. (2022). Implementasi good corporate governance dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. *Jurnal Management Risiko Dan Keuangan*, 1(2), 128–141. <https://doi.org/10.21776/jmrk.2022.01.2.06>
- Spence, M. (1973). Job Market Signalling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3).
- Sucitra, K., Sari, R., & Widyastuti, S. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Audit Tenure Dan Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Korelasi Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2.

- Zaitul, & Ilona, D. (2018). Gender in Audit Committee and Financial Reporting Timeliness : the Case of Unique Continental European Model. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(2.29), 436–442. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.29.13668>
- Zaitul, Ilona, D., Salfadri, Aqila, F. A. R., & Rahmawati, D. (2023). Kinerja ESG : Kontribusi Board Gender Diversity Dan Network. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 16(2), 209–218.
- Zaitul, Melmusi, Z., & Ilona, D. (2021). Board Governance Diversity and the International Decision of Indonesia's Service Companies. *Estudios de Economia Aplicada*, 39(4), 1–12. <https://doi.org/10.25115/eea.v39i4.4309>
- Zaitul, Sari, A. Y., Puspa, D. F., Rahmawati, N., & Ilona, D. (2022). Pengaruh busyness, ukuran dewan komisaris, dan keahlian keuangan komite audit terhadap biaya audit. *Jurnal Maneksi*, 11(2), 456–464.